



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA
SUB UNIT KERJA : REKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JAMALIAH**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANGUMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **151290**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.670.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 544 m2/600 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 378 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 362 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 203 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 203 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 352 m2 di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 407.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, HONDA HR-V RUS MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	60.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	391.861.053
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.529.361.053
III. HUTANG	Rp.	250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.279.361.053

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.